



Dilema Euthyphro dan Dasar Moralitas: Apakah Kebaikan Bergantung pada Perintah Tuhan?

Adelmi Kurniawati Ds^{1*}, Olin Harun², Usman Pakaya³

¹⁻⁵Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo

Korespondensi penulis: adelmids15@guru.smp.belajar.id

Abstract: The Euthyphro Dilemma remains central to contemporary debates about the grounding of morality: are actions good because God commands them, or does God command them because they are good? This article reconstructs the main arguments in the dilemma, critically evaluates Divine Command Theory (DCT) and its variants (especially modified DCT) in comparison with non-theistic moral realism, and connects the debate to the need for public justification of norms in plural educational and cultural contexts. Using qualitative library research and philosophical-conceptual analysis (conceptual analysis, argument reconstruction, and critical normative appraisal), the study finds that strong DCT provides a straightforward account of the bindingness of obligation but faces the arbitrariness objection. Modified DCT mitigates arbitrariness by grounding commands in God's good nature, yet it inherits challenges of circularity and limited public justificatory reach. The article proposes a **layered justification model**: theistic reasons may operate as internal motivational grounds for character formation, while institutional norms in education should also be supported by reasons accessible across diverse worldviews. This is aligned with Indonesia's educational aims that combine faith/virtue and critical reasoning in the 8 dimensions of graduation profile.

Keywords: Euthyphro dilemma; Divine Command Theory; moral theism; moral realism; public justification; moral education.

Abstrak: Dilema Euthyphro tetap menjadi pusat perdebatan kontemporer tentang landasan moralitas: apakah tindakan baik karena Tuhan memerintahkannya, atau apakah Tuhan memerintahkannya karena tindakan itu baik? Artikel ini merekonstruksi argumen utama dalam dilema tersebut, mengevaluasi secara kritis Teori Perintah Ilahi (DCT) dan variannya (terutama DCT yang dimodifikasi) dibandingkan dengan realisme moral non-teistik, dan menghubungkan perdebatan tersebut dengan kebutuhan akan pembenaran publik atas norma-norma dalam konteks pendidikan dan budaya yang plural. Dengan menggunakan riset pustaka kualitatif dan analisis filosofis-konseptual (analisis konseptual, rekonstruksi argumen, dan penilaian normatif kritis), studi ini menemukan bahwa DCT yang kuat memberikan penjelasan yang lugas tentang keterikatan kewajiban tetapi menghadapi keberatan kesewenang-wenangan. DCT yang dimodifikasi mengurangi kesewenang-wenangan dengan mendasarkan perintah pada sifat baik Tuhan, namun mewarisi tantangan sirkularitas dan jangkauan pembenaran publik yang terbatas. Artikel ini mengusulkan model justifikasi berlapis: alasan teistik dapat berfungsi sebagai landasan motivasi internal untuk pembentukan karakter, sementara norma-norma institusional dalam pendidikan juga harus didukung oleh alasan-alasan yang dapat diakses di berbagai pandangan dunia. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Indonesia yang menggabungkan iman/kebaikan dan penalaran kritis dalam 8 dimensi profil kelulusan.

Kata kunci: Dilema Euthyphro; Teori Perintah Ilahi; teisme moral; realisme moral; justifikasi publik; pendidikan moral.

1. LATAR BELAKANG

Dalam banyak tradisi teistik, relasi manusia dengan Tuhan tidak hanya dipahami sebagai relasi spiritual, tetapi juga sebagai relasi normatif: manusia dinilai “baik” atau “buruk” bukan semata oleh konsekuensi sosial tindakannya, melainkan oleh kesesuaianya dengan kehendak ilahi. Di titik ini, pertanyaan metaetika menjadi tak terhindarkan: apakah kebaikan (goodness) bergantung pada perintah Tuhan, ataukah perintah Tuhan bergantung pada kebaikan yang

independen? Pertanyaan ini bukan sekadar permainan konsep, melainkan menyentuh fondasi legitimasi moral, otoritas normatif agama, dan rasionalitas penilaian etis lintas keyakinan.

Problem tersebut dikristalkan secara klasik dalam dialog *Euthyphro* ketika Socrates menekan definisi kesalehan: “*apakah yang suci/ saleh dicintai para dewa karena ia suci, atau ia suci karena dicintai para dewa?*” (Plato, n.d.). [Project Gutenberg](#) Pertanyaan ini memunculkan Dilema Euthyphro yang, dalam formulasi kontemporer, menantang keluarga pandangan yang sering disebut *divine command theory* (DCT). Dalam istilah yang lebih hati-hati, Mark Murphy mengelompokkan DCT dalam payung theological voluntarism: sekumpulan pandangan metaetika dan normatif yang sama-sama menegaskan bahwa *apa yang Tuhan kehendaki* relevan untuk menentukan status moral suatu tindakan/sifat/keadaan (Murphy, 2025). [Stanford Encyclopedia of Philosophy](#)

Dilema Euthyphro biasanya dipahami sebagai dua “tanduk” yang sama-sama problematik bagi teisme moral jika tidak dipilah dengan presisi:

- A. Jika kebaikan bergantung pada perintah Tuhan, maka ancamannya adalah *arbitrariness* (kesewenang-wenangan) dan tantangan terhadap makna “Tuhan itu baik”: Tuhan tampak “menciptakan” baik-buruk lewat dekret, sehingga moralitas menjadi kontingen dan berpotensi kehilangan rasionalitas internalnya.
- B. Jika perintah Tuhan bergantung pada kebaikan yang independen, maka otoritas moral Tuhan tampak tidak fundamental: Tuhan “mengenali” standar moral yang sudah ada, sehingga teisme moral perlu menjelaskan apa status ontologis standar itu dan bagaimana Tuhan terkait dengannya.

Murphy (2025) menunjukkan bahwa perdebatan theological voluntarism memang bergerak pada pembedaan varian metaetika vs normatif, jenis ketergantungan (dependence), serta kesulitan-kesulitan “perennial” seperti relasi voluntarisme dengan kebaikan Tuhan dan tuduhan arbitrariness. [Stanford Encyclopedia of Philosophy](#) Dengan kata lain, *arena debatnya sudah mapan*, tetapi tetap terbuka untuk kontribusi baru, terutama ketika kajian tidak berhenti pada koherensi internal teori, melainkan menilai daya kerja teori dalam konteks sosial-politik plural.

Di sinilah urgensi kontemporer masuk. Dalam masyarakat demokratis yang plural, legitimasi norma publik tidak dapat diasumsikan bertumpu pada satu doktrin komprehensif. Teori *public justification* menempatkan standar bahwa penggunaan kuasa politik (terutama koersif) harus dapat dibenarkan kepada publik melalui alasan yang dapat diterima atau dikenali

sebagai valid oleh warga (Vallier, 2022). [Stanford Encyclopedia of Philosophy](#) John Rawls, salah satu tokoh utama, merumuskan *public reason* sebagai cara bernalar tentang nilai-nilai politik bersama yang “tidak melanggar” doktrin komprehensif warga selama kompatibel dengan kebebasan dasar, serta menekankan kriteria resiprositas dalam pemberian legitimasi politik (Rawls, 1997). [nlnrac.org](#) Dennis Thompson menegaskan pergeseran agenda *Political Liberalism*: dari sekadar teori keadilan menuju teori legitimasi dalam menghadapi “fakta pluralisme yang wajar” (reasonable pluralism) (Thompson, 2018). [Harvard Dash](#)

Research gap (Gap C) yang disatukan ke latar belakang

Walau Dilema Euthyphro dan theological voluntarism telah dibahas luas pada ranah metaetika/filsafat agama, relasi eksplisitnya dengan tuntutan *public justification/public reason* dalam masyarakat plural sering tidak dijadikan fokus utama analisis. Ada jarak konseptual antara:

- A. Debat “*fondasi moralitas*” (apakah bergantung pada kehendak Tuhan atau independen), dan
- B. Debat “*legitimasi alasan*” di ruang publik (alasan apa yang layak membenarkan norma koersif kepada warga yang berbeda keyakinan).

Padahal, kedua ranah itu bertemu langsung ketika klaim moral teistik dipakai untuk mendukung norma sosial-politik (misalnya kebijakan tentang hidup-mati, kebebasan, martabat, atau hak). Dengan demikian, gap penelitian yang dapat Anda ajukan adalah: bagaimana strategi pembelaan teisme moral (theological voluntarism atau variannya) dapat menjawab Dilema Euthyphro sekaligus menghasilkan bentuk pemberian yang kompatibel dengan standar public reason/public justification di bawah kondisi pluralisme yang wajar? Pertanyaan ini penting karena tanpa jembatan tersebut, pembelaan teisme moral berisiko (i) kuat secara internal tetapi lemah secara publik, atau (ii) “diterjemahkan” ke bahasa publik dengan mengorbankan inti teistiknya.

Secara akademik, kajian ini perlu dibahas karena ia memetakan ulang konsekuensi Dilema Euthyphro bukan hanya pada level definisi “baik”, tetapi juga pada level kewajiban memberi alasan kepada sesama warga: apakah moralitas teistik dapat menawarkan dasar yang tidak jatuh pada arbitrariness, namun tetap mampu dipertanggungjawabkan secara rasional kepada pihak yang tidak berbagi premis teologis. Dengan menggabungkan analisis metaetika (struktur dilema dan opsi respons teistik) dan teori legitimasi politik (public reason/justification), penelitian ini punya kontribusi yang jelas, dapat diuji secara argumentatif, dan relevan untuk diskusi etika dalam konteks sosial yang majemuk.

2. KAJIAN TEORITIS

Dilema Euthyphro sebagai Masalah Metaetika tentang Dasar Moralitas

Dilema Euthyphro (Plato) merumuskan pertanyaan metaetis klasik: *apakah sesuatu baik karena diperintahkan Tuhan, atau Tuhan memerintahkannya karena ia baik?* Dua “tanduk” dilema ini memaksa kita memilih antara (i) voluntarisme teologis yang berisiko menjadikan kebaikan tampak arbitrer, dan (ii) independensi moral yang berisiko melemahkan klaim bahwa Tuhan adalah sumber ultim moralitas. Dengan demikian, dilema ini bukan sekadar soal teologi normatif, melainkan soal ontologi moral (apa yang membuat fakta moral menjadi benar) dan sumber normativitas (mengapa kewajiban moral mengikat).

Dalam riset ini, istilah “kebaikan” dan “kewajiban” perlu dibedakan: banyak pembela *Divine Command Theory* (DCT) memfokuskan teori pada keluarga konsep deontik (wajib, terlarang, boleh), bukan seluruh ranah nilai (aksiologis) seperti “baik/buruk” secara umum. Pembedaan ini penting karena sebagian respons teistik terhadap Euthyphro mencoba menyelamatkan *kewajiban* (*obligation*) tanpa harus mengklaim bahwa seluruh *nilai* identik dengan kehendak atau perintah Tuhan.

3.2. Divine Command Theory dan Motivasi Teistik: Otoritas, Keterikatan, dan Moral Obligation

DCT, dalam bentuk intinya, menyatakan bahwa kewajiban moral manusia bergantung pada perintah Tuhan. Salah satu motivasinya adalah penjelasan tentang mengapa “wajib” bersifat mengikat: perintah dari otoritas moral tertinggi memberi struktur kewajiban, bukan sekadar preferensi atau konvensi. Dalam literatur kontemporer, DCT sering dipadukan dengan klaim bahwa Tuhan tidak memerintah secara arbitrer, melainkan selaras dengan karakter ilahi yang baik (misalnya, “God is loving and good”).

Namun, proyek DCT modern menghadapi dua tantangan:

- A. Tantangan arbitreritas: jika “benar” hanya karena “diperintah,” maka perintah yang tampak kejam atau tidak masuk akal menjadi sulit dikritik secara moral.
- B. Tantangan redundansi/independensi: jika Tuhan memerintah karena sudah ada standar kebaikan yang independen, maka standar itulah yang tampak fundamental, bukan perintahnya.

Respons Teistik terhadap Dilema: Modified DCT dan Theistic Moral Realism

Salah satu respons berpengaruh adalah Modified Divine Command Theory (sering diasosiasikan dengan Adams): kewajiban moral dikaitkan dengan perintah Tuhan yang baik dan mengasihi, sehingga unsur arbitreritas dipangkas karena sifat Tuhan membatasi ruang perintah yang mungkin. Wielenberg mencatat pengaruh Adams (1999) dalam “renaissance” DCT sekaligus menegaskan bahwa DCT tetap menanggung beban argumentatif untuk menunjukkan bahwa perintah ilahi benar-benar *menciptakan* kewajiban (bukan hanya *mengumumkan* atau *mengomunikasikannya*).

Di sisi lain, sebagian teisme memilih jalur theistic moral realism: fakta moral objektif berakar pada natur/karakter Tuhan (goodness as God’s nature), bukan pada perintah kontingen. Strategi ini berupaya menolak tanduk “arbitrer” tanpa menerima tanduk “standar independen di luar Tuhan,” karena standar moral dipandang identik dengan realitas ilahi itu sendiri. Tetapi strategi ini menghadapi pertanyaan lanjutan: apakah “kebaikan = natur Tuhan” benar-benar menjelaskan normativitas, atau hanya memindahkan problem (dari perintah ke esensi)? Dalam konteks ini, kritik teologis kontemporer bahkan menilai bahwa DCT tertentu tidak cukup “Kristiani” karena kurang terhubung dengan pusat teologi (mis. Kristologi) dan visi moral Perjanjian Baru yang lebih menekankan pembentukan karakter dibanding kepatuhan legalistik.

Membela Independensi Moralitas: Realisme Moral Non-Teistik dan Kritik terhadap DCT

Pembela non-teistic moral realism berargumen bahwa fakta moral objektif dapat berdiri sendiri sebagai fakta normatif yang niscaya, tanpa komitmen teologis. Dalam argumen kontemporer, Wielenberg (2022) menolak klaim bahwa kewajiban moral membutuhkan perintah ilahi; ia mempertanyakan apakah “perintah” (bahkan dari Tuhan) cukup untuk *menghasilkan* kewajiban tanpa asumsi normatif tambahan (misalnya, bahwa kita *seharusnya* menaati otoritas tertentu). Dengan kata lain, DCT berisiko memasukkan normativitas secara terselubung pada premis yang belum dibenarkan.

Kritik ini diperkuat oleh upaya lain yang menunjukkan bahwa struktur metaetika DCT dapat “ditiru” tanpa Tuhan personal. Bass (2024), misalnya, mengeksplorasi model DCT “tanpa divine commander” untuk menguji komponen mana yang betul-betul esensial bagi penjelasan kewajiban, dan mana yang sekadar atribut teistik yang tidak diperlukan untuk fungsi metaetis teori. Eksperimen konseptual semacam ini menekan DCT agar menjelaskan apa tepatnya yang membuat “perintah” menjadi *normatif* alih-alih sekadar *kausal* atau *psikologis*.

Jembatan ke Ranah Pendidikan dan Kebudayaan: Justifikasi Publik, Alasan Religius, dan Pluralisme

Research gap yang Anda pilih (gap C) menjadi signifikan ketika debat Euthyphro tidak berhenti sebagai pertarungan abstrak metaetika, tetapi ditarik ke wilayah pendidikan moral dan kebudayaan dalam masyarakat plural. Dalam pendidikan, problemnya bukan hanya “teori mana benar,” tetapi juga: *bagaimana* dasar moral dipresentasikan sebagai pengetahuan dan praktik yang dapat diterima lintas keyakinan, tanpa mereduksi agama menjadi privat atau memaksakan satu doktrin sebagai standar negara.

Di sini, kerangka public justification berguna: legitimasi norma bersama (termasuk norma pendidikan publik) menuntut alasan yang “dapat diterima” atau “dapat dipahami” oleh warga yang berbeda pandangan komprehensif. Entri Stanford Encyclopedia tentang *public justification* menekankan bahwa gagasan ini menjadi kunci dalam teori politik liberal-demokratis modern.

Perdebatan kontemporer tentang peran alasan religius dalam ruang publik sering dipetakan sebagai eksklusivisme (membatasi alasan religius) vs inklusivisme (membolehkan alasan religius). Wong (2024) menunjukkan peta debat ini sekaligus menawarkan perluasan fokus: bukan hanya “alasan religius” dalam argumen, tetapi juga “perilaku religius” (aksi altruistik) yang dapat memperkuat saling-paham dalam deliberasi publik. Meskipun konteksnya politik, implikasinya relevan bagi pendidikan: pembelajaran etika dapat menilai kontribusi agama tanpa mensyaratkan legitimasi moral hanya dari klaim wahyu.

Di level kurikulum dan tata kelola sekolah, literatur juga menegaskan bahaya “religious illiteracy” dalam demokrasi modern. Löffler (2020) berargumen bahwa pentingnya agama secara kultural dan dampaknya terhadap stabilitas demokrasi memberi alasan (bahkan alasan sekuler) untuk memasukkan pengetahuan agama dalam kurikulum publik, dengan desain kelembagaan yang tetap menjaga netralitas negara.

Relevansi pada Konteks Indonesia: Profil Pelajar Pancasila dan Agenda Pendidikan Perdamaian

Dalam konteks Indonesia, diskursus moralitas-agama langsung bersentuhan dengan mandat karakter kebangsaan. Profil Pelajar Pancasila secara eksplisit memuat dimensi

“beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhhlak mulia” serta mengartikulasikannya sebagai akhlak dalam relasi dengan Tuhan dan relasi sosial-kewargaan.

Secara global, UNESCO (2023) menegaskan peran pendidikan untuk perdamaian, HAM, kebebasan fundamental, kewargaan global, dan pembangunan berkelanjutan, termasuk tuntutan koherensi kurikulum dan pedagogi agar mendukung budaya damai serta partisipasi demokratis. Kerangka ini memperkuat urgensi riset yang menjembatani dasar moralitas (metaetika) dengan desain pendidikan moral di masyarakat plural.

Dengan demikian, kajian Euthyphro dapat diposisikan sebagai fondasi teoritis untuk menjawab dilema praktis pendidikan: bagaimana mengajarkan moralitas yang (i) cukup kuat untuk membentuk karakter, (ii) tetap menghormati pluralisme keyakinan, dan (iii) tidak mengorbankan integritas religius maupun nalar publik. Studi-studi karakter berbasis Pancasila juga menekankan urgensi penguatan nilai moral dalam lanskap teknologi dan globalisasi; ini menyediakan konteks kebijakan-kultural yang membuat debat metaetika relevan secara terapan.

Sintesis Teoretis: Matriks Analisis untuk Menilai “Dasar Moralitas”

Untuk menjaga alur argumentatif riset, kerangka teoritis penelitian ini menggunakan tiga lensa evaluatif yang menstrukturkan perdebatan:

- A. Lensa ontologis: apakah fakta moral (khususnya kewajiban) bergantung pada (a) perintah Tuhan, (b) natur Tuhan, atau (c) fakta normatif independen.
- B. Lensa normatif-otoritatif: bagaimana sebuah “sumber” menghasilkan keterikatan (bindingness) tanpa menyelundupkan normativitas sebagai asumsi.
- C. Lensa pedagogis-justifikatoris: bagaimana dasar moral diterjemahkan menjadi alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pendidikan publik yang plural melalui prinsip justifikasi publik, tanpa menghapuskan kontribusi agama sebagai tradisi moral-kultural.

3. METODE PENELITIAN

Desain dan Pendekatan yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research) berbasis analisis filosofis-konseptual. Desain ini tepat karena tujuan penelitian bukan mengukur perilaku atau sikap responden, melainkan **merekonstruksi dan**

menevaluasi argumen (argument reconstruction and appraisal) terkait Dilema Euthyphro, teisme moral, serta implikasinya bagi justifikasi moral di ruang publik pendidikan yang plural.

Prosedur analisis mencakup tiga metode utama:

- A. Analisis konseptual: memperjelas istilah (baik, wajib, dependensi, otoritas, grounding) dan membedakan level klaim (semantik–epistemik–metafisis).
- B. Rekonstruksi argumen: memetakan premis–kesimpulan pada Dilema Euthyphro, DCT kuat, *modified DCT*, dan realisme non-teistik.
- C. Evaluasi normatif-kritis: menilai posisi berdasarkan kriteria non-arbitrariness, non-circularity, daya-mengikat kewajiban, dan kelayakan justifikasi publik untuk konteks pendidikan plural.

Sumber rujukan mencakup: teks klasik (Plato), artikel dan monografi metaetika/DCT, serta literatur *public reason/public justification* dan dokumen orientasi pendidikan karakter.

Teknik pengumpulan data

Data dikumpulkan melalui **studi dokumentasi**: identifikasi literatur, seleksi berdasarkan kriteria inklusi, pencatatan konsep/argumen kunci, serta pengelompokan literatur ke dalam tema analisis (Euthyphro, DCT/voluntarisme, alternatif non-teistik, public justification, dan implikasi pendidikan).

Teknik analisis data (prosedur langkah demi langkah)

Analisis dilakukan melalui tahapan berikut:

- A. **Koding konseptual** Menandai istilah, definisi, dan klaim kunci (mis. “bergantung”, “otoritas”, “kewajiban”, “nilai moral”, “publik”).
- B. **Rekonstruksi argumen inti** Menyusun ulang argumen utama dalam format premis–kesimpulan untuk:

Tanduk A dan tanduk B dilema Euthyphro.

Respons teistik (DCT kuat, modified DCT, natur Tuhan).

Alternatif non-teistik (realisme moral, error theory) sebagai pembanding.

- C. **Uji Koherensi Internal** Menguji validitas inferensi, konsistensi premis, dan potensi circularity (mis. definisi “baik” yang berputar).

- D. **Uji Daya Jelaskan (explanatory adequacy)** Menilai apakah teori menjelaskan: (a) *bindingness* kewajiban, (b) non-arbitrariness, (c) keterhubungan antara nilai dan kewajiban.
- E. **Analisis Implikasi Untuk Justifikasi Publik Di Pendidikan** Menilai apakah alasan berbasis “perintah Tuhan” dapat berfungsi sebagai alasan normatif dalam **ruang pendidikan publik yang plural**, atau perlu diterjemahkan ke alasan yang lebih “intersubjektif” agar kompatibel dengan tuntutan justifikasi publik.
- F. **Sintesis** Menyusun kesimpulan argumentatif: posisi mana yang paling stabil terhadap Euthyphro, dan apa konsekuensi pedagogis-kulturalnya (mis. desain pembelajaran etika: alasan religius sebagai motivasi internal vs justifikasi publik).

Kriteria evaluasi argumen (rubrik filosofis)

Agar penilaian tidak subjektif, penelitian menggunakan kriteria berikut:

- A. **Non-arbitrariness**: teori tidak membuat moralitas bergantung pada kehendak yang dapat menghalalkan apa pun.
- B. **Non-circularity**: penjelasan tidak berputar (mis. “baik karena Tuhan; Tuhan baik karena baik”).
- C. **Normative force**: teori menjelaskan mengapa kewajiban mengikat, bukan sekadar melaporkan preferensi/otoritas.
- D. **Public justifiability**: alasan moral dapat dipertanggungjawabkan dalam ruang pendidikan-plural tanpa menuntut penerimaan doktrin tertentu sebagai syarat rasionalitas.
- E. **Comparative adequacy**: teori lebih baik (atau setidaknya tidak lebih buruk) daripada alternatif utama dalam menjelaskan objektivitas dan kewajiban moral.

Batasan Metode

Metode ini tidak menghasilkan generalisasi statistik atau temuan perilaku peserta didik. Kontribusinya adalah **klarifikasi konseptual, pemetaan argumen, dan implikasi normatif** untuk pendidikan dan kebudayaan dalam masyarakat plural.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Setting Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan; “lokasi penelitian” dipahami sebagai lokasi akses sumber pustaka dan ruang kerja analisis. Lokasi: akses literatur daring (portal jurnal dan basis data) serta akses luring (koleksi perpustakaan kampus) bila tersedia. Rentang waktu: pengumpulan dan seleksi literatur (Oktober–November 2025), analisis dan penulisan (November–Desember 2025).

Proses Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan langkah:

- a. Penetapan kata kunci (Indonesia–Inggris): *Euthyphro dilemma, divine command theory, theological voluntarism, modified DCT, moral realism, public reason/public justification, pluralisme* dan pendidikan moral;
- b. Penelusuran sumber akademik;
- c. Seleksi berbasis relevansi tema, kelayakan ilmiah, dan keterbacaan argumen;
- d. Ekstraksi “data argumentatif”: klaim inti, premis, keberatan, respons, dan implikasi.

B. Hasil Analisis Data

Temuan analisis menunjukkan tiga poin ringkas berikut.

Analisis Konseptual

Perdebatan lebih presisi jika membedakan nilai (kebaikan) dan kewajiban (mengikat). “Bergantung pada Tuhan” harus dibedakan: semantik, epistemik, atau metafisis/grounding. Untuk pendidikan plural, justifikasi moral perlu dipilah menjadi ranah internal dan publik.

Rekonstruksi Argumen

Dilema Euthyphro menekan DCT: “baik karena diperintah” → risiko arbitrariness; “diperintah karena baik” → indikasi independensi moralitas. DCT identitas mendapat tekanan kuat melalui *trilemma* (konsistensi, determinasi perintah, dan identitas properti). *Modified DCT* (mis. Adams) meredam arbitrariness dengan karakter ilahi yang baik, tetapi memunculkan isu sirkularitas.

Evaluasi Normatif-Kritis (Ilustrasi Ringkas)

Tabel 1. Ringkasan evaluasi posisi (ilustratif)

Posisi	Non-arbitrariness	Non-circularity	Normative force	Public justifiability
DCT kuat	Rendah–Sedang	Sedang	Tinggi	Rendah
Modified DCT	Sedang–Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang
Realisme non-teistik	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi

Penilaian ringkas ini konsisten dengan literatur yang menunjukkan kebangkitan DCT modern sekaligus kritik terhadap klaim kebutuhan perintah ilahi bagi kewajiban moral.

C. Pembahasan

Pertama, hasil kajian menegaskan bahwa kekuatan DCT kuat terutama pada aspek **normative force**: kewajiban tampak jelas mengikat karena berhubungan dengan otoritas ilahi. Namun, kesederhanaan ini dibayar dengan meningkatnya risiko *arbitrariness* ketika kewajiban dipahami sebagai “sekadar akibat perintah.” Kritik ini menjadi lebih tajam pada versi identitas DCT sebagaimana ditunjukkan oleh Murphy.

Kedua, *modified DCT* memperbaiki kelemahan utama tersebut dengan menautkan perintah pada karakter Tuhan yang baik (misalnya dalam kerangka Adams). Ini membuat perintah tidak dipahami sebagai kehendak acak, melainkan sebagai ekspresi kebaikan ilahi. Namun, strategi ini memindahkan beban argumentasi: konsep “Tuhan itu baik” harus dijelaskan secara substantif agar tidak jatuh pada sirkularitas (baik karena berasal dari Tuhan; Tuhan baik karena menjadi standar baik).

Ketiga (sesuai gap C), kontribusi terpenting penelitian ini adalah transisi dari debat metaetika menuju **kebutuhan justifikasi publik dalam pendidikan**. Di ruang pendidikan yang plural, norma institusional (aturan sekolah, pembinaan karakter, dan kebijakan evaluasi perilaku) perlu dapat dipertanggungjawabkan kepada peserta didik dan warga sekolah yang beragam keyakinan. Rawls menekankan pemberian politik melalui alasan publik dalam masyarakat majemuk, sementara teori *public justification* menegaskan legitimasi norma melalui alasan yang dapat diterima dari sudut pandang warga berbeda.

Karena itu, artikel ini mengusulkan **model pembedaran berlapis**:

- Lapisan internal:** alasan teistik tetap sah sebagai dasar motivasi, pembentukan kebijakan, dan orientasi makna (misalnya “ketaatan” sebagai disiplin moral).

- B. **Lapisan publik:** untuk norma pendidikan yang berlaku umum, alasan teistik sebaiknya dilengkapi dengan alasan yang dapat diuji dan dipahami lintas keyakinan (misalnya martabat manusia, pencegahan kerugian, keadilan, dan koeksistensi damai), sejalan dengan mandat pendidikan untuk karakter dan nalar kritis. Model ini tidak menyingkirkan agama dari pendidikan moral, tetapi menempatkannya secara tepat: **religius sebagai sumber internal**, dan **publik sebagai kerangka pemberian normatif bersama**.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- A. Dilema Euthyphro tetap menjadi uji konseptual utama bagi teisme moral karena memaksa klarifikasi hubungan perintah Tuhan, kebaikan, dan kewajiban.
- B. DCT kuat unggul dalam menjelaskan daya-mengikat kewajiban, tetapi rentan terhadap *arbitrariness*, terutama pada versi identitas yang dikritik melalui *trilemma Murphy*.
- C. *Modified DCT* lebih stabil terhadap problem arbitrariness dengan menautkan perintah pada karakter ilahi yang baik (misalnya Adams), tetapi memikul beban tambahan terkait potensi sirkularitas dan keterbatasan sebagai alasan publik.
- D. Dalam konteks pendidikan dan kebudayaan yang plural, riset ini menegaskan kebutuhan model pemberian berlapis: alasan teistik dihargai sebagai basis internal pembentukan karakter, sementara norma institusional pendidikan memerlukan pemberian publik lintas keyakinan.

Saran

- A. **Riset lanjutan** dapat memperluas kajian pada perbandingan sistematis antara *modified DCT*, realisme moral teistik berbasis natur, dan pendekatan kebajikan (virtue ethics) untuk menguji lebih rinci isu sirkularitas dan grounding kewajiban.
- B. **Praktik pendidikan** dapat memanfaatkan Dilema Euthyphro sebagai perangkat pedagogi nalar etis: melatih peserta didik membedakan klaim metaetika, normatif, dan publik-institusional, selaras dengan dimensi “bernalar kritis” dalam 8 Dimensi Profil Lulusan
- C. **Kebijakan sekolah** disarankan menerapkan pemberian berlapis: ruang motivasi religius tetap diakui, namun kebijakan umum sekolah dibangun dengan alasan yang

inklusif dan komunikatif agar kompatibel dengan pluralisme dan tujuan koeksistensi damai.

DAFTAR REFERENSI

- Adams, R. M. (1999). *Finite and infinite goods: A framework for ethics*. Oxford University Press. [Google Books+1](#)
- Frede, D. (2022). The holy and the god-loved: The dilemma in Plato's *Euthyphro*. *The Monist*, 105(3), 293–308. <https://doi.org/10.1093/monist/onac001> [OUP Academic](#)
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (n.d.). *Profil Pelajar Pancasila*. Retrieved December 16, 2025, from https://ditsd.kemendikdasmen.go.id/hal/profil-pelajar-pancasila_ditsd.kemendikdasmen.go.id
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (n.d.). *Dimensi Profil Pelajar Pancasila* (PDF). Retrieved December 16, 2025, from https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/unduhan/Dimensi_PPP.pdf [Kurikulum Kemdikbud](#)
- Murphy, M. C. (2002). A trilemma for divine command theory. *Faith and Philosophy*, 19(1), 22–31. <https://doi.org/10.5840/faithphil20021914> [place.asburyseminary.edu](#)
- Plato. (n.d.). *Euthyphro* (B. Jowett, Trans.). The Internet Classics Archive. Retrieved December 16, 2025, from <https://classics.mit.edu/Plato/euthyfro.html> [Internet Classics Archive](#)
- Rawls, J. (1997). The idea of public reason revisited. *University of Chicago Law Review*, 64(3), 765–807. <https://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol64/iss3/1/> [Chicago Unbound](#)
- UNESCO. (2023). *Recommendation on education for peace and human rights, international understanding, cooperation, fundamental freedoms, global citizenship and sustainable development*. <https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-education-peace-and-human-rights-international-understanding-cooperation-fundamental> [UNESCO](#)
- Vallier, K. (2022). Public justification. In E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2022 ed.). Metaphysics Research Lab, Stanford University. <https://plato.stanford.edu/archives/win2022/entries/justification-public/> [Stanford Encyclopedia of Philosophy](#)
- Wielenberg, E. J. (2014). *Robust ethics: The metaphysics and epistemology of godless normative realism*. Oxford University Press. [OUP Academic](#)
- Wielenberg, E. J. (2022). Divine commands are unnecessary for moral obligation. *Journal of Ethics and Social Philosophy*, 21(1). <https://doi.org/10.26556/jesp.v21i1.1261> [jesp.org](#)